

**ANALISIS BINGKAI PEMBERITAAN KASUS PENYEBARAN
HOAKS RATNA SARUMPAET PADA MEDIA DARING KOMPAS
DAN REPUBLIKA PERIODE OKTOBER 2018**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**



Oleh :

ASTARI YASMUNING DYAH

NIM. B91215050

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Astari Yasmuning Dyah

NIM : B91215050

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : Analisis Bingkai Pemberitaan Kasus Penyebaran Hoaks
Ratna Sarumpaet di Media Daring Kompas dan Republika
Periode Oktober 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari terbukti ataupun dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum berlaku.

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Astari Yasmuning Dyah
NIM.B91215050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh

Nama : Astari Yasmuning Dyah

NIM : B91215050

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Analisis Bingkai Pemberitaan Kasus Penyebaran Hoaks Ratna Sarumpaet
di Media Daring Kompas dan Republika Periode Oktober 2018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 28 Maret 2019

Pembimbing,



Lukman Hakim S. Ag, M.Si, MA

NIP.197308212005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Astari Yasmuning Dyah ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 8 April 2019

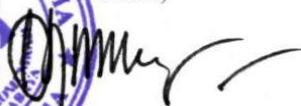
Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Dekan,


Dr. H. Abd. Halim, M.Ag.
NIP.196307251991031003

Penguji I,


Lukman Hakim S.Ag, M.Si, MA.
NIP.197308212005011004

Penguji II,


Drs. Prihananto, M.Ag.
NIP.196812301993031003

Penguji III,


M. Anis Bachtiar, M.Fil.I.
NIP.196912192009011002

Penguji IV,


Tias Satria Adhitama, MA.
NIP.197805092006041004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Astari Yasmuning Dyah
NIM : B91215050
Fakultas/Jurusan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat E-mail : startingnowornever@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

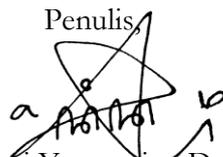
Analisis Bingkai Pemberitaan Kasus Penyebaran Hoaks Ratna Sarumpaet pada Media Daring Kompas dan Republika Periode Oktober 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Astari Yasmuning Dyah)
nama terang dan tanda tangan

yang dialami Ratna Sarumpaet merupakan sebuah pelanggaran HAM, dan bahkan perbuatan pengecut mengingat dilakukan kepada perempuan berusia 70 tahun.³

Informasi mengenai dugaan penganiayaan semakin masif diberitakan. Di era keterbukaan informasi saat ini, media daring lebih santer memberitakan kabar dugaan penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet tersebut ketimbang media konvensional lain. Perkembangan berita mengenai kabar pengeroyokan terhadap Ratna terus diperbarui. Spekulasi semakin berkembang seiring dukungan dan rasa simpati berbagai pihak terhadap isu penganiayaan tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada tanggal 2 Oktober 2018, Prabowo diberitakan menemui Ratna bersama dengan Amien Rais Dewan Kehormatan PAN dan Fadli Zon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Setelah menjenguk Ratna, Prabowo menggelar konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertajaya, Jakarta Selatan. Ia mengatakan, pengeroyokan terhadap Ratna disinyalir berkaitan dengan sikap politiknya karena pelaku tidak mengambil barang apapun yang dibawa Ratna saat itu.⁴ Prabowo juga mengatakan, tindak kekerasan yang disertai ancaman membuat Ratna enggan melaporkan dugaan pemukulan ke pihak berwajib.⁵ Dalam pertemuan itu, Ratna menjabarkan kronologi penganiayaan yang menimpa dirinya tersebut.

Melalui Nanik S. Deyang Wakil Ketua Tim BPN Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, kronologi penganiayaan terhadap Ratna disampaikan kepada awak

³ Rizkyan Adiyudha, *Ratna Sarumpaet Diduga Dianiaya, Prabowo Akan Temui Kapolri*, (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/02/pfz748354-ratna-sarumpaet-diduga-dianiaya-prabowo-akan-temui-kapolri>, diakses pada 21 Januari 2019).

⁴ Francisca Christy Rosana, *Prabowo Sebut Ratna Sarumpaet Diintimidasi karena Jadi Jurkam*, (<https://nasional.tempo.co/read/1132396/prabowo-sebut-ratna-sarumpaet-diintimidasi-karena-jadi-jurkam>, diakses pada 4 Februari 2019).

⁵ Rizkyan Adiyudha, *Ratna Sarumpaet Diduga Dianiaya, Prabowo Akan Temui Kapolri*, (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/02/pfz748354-ratna-sarumpaet-diduga-dianiaya-prabowo-akan-temui-kapolri>, diakses pada 21 Januari 2019).

media. Nanik menyampaikan, saat tanggal 21 September 2018, Ratna Sarumpaet usai menghadiri sebuah konferensi di sebuah hotel. Selesai acara, bersama dua temannya yang berasal dari Sri Lanka dan Malaysia menumpangi sebuah taksi menuju Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Mendekati bandara, taksi berhenti di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Dua teman Ratna lalu turun dari taksi dan berjalan menuju ke arah bandara. Setelah kedua temannya sudah berlalu ke bandara, Ratna ditarik tiga orang ke tempat gelap, lalu dianiaya. Dari penganiayaan itu, kepala Ratna sobek dan luka. Perut aktivis itu juga diinjak. Kejadian itu berlangsung dengan cepat. Setelah kejadian itu, Ratna dibopong sopir taksi masuk ke dalam mobil, lalu Ratna dibawa dan diturunkan di daerah Cimahi. Sesampainya di Cimahi, Ratna langsung menuju sebuah rumah sakit dan menghubungi seorang dokter bedah yang merupakan teman Ratna, dan segera ditangani. Setelah selesai menangani luka-luka, malam tanggal 21 September 2018 itu juga, Ratna langsung bertolak menuju Jakarta.⁶

Berbagai kalangan yang simpatik terus mendorong dan mendukung Ratna untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Laporan kepada kepolisian untuk mengusut dugaan penganiayaan tersebut juga telah diterima. Kepolisian pun juga mulai mendesak Ratna Sarumpaet sendiri untuk melapor, namun Ratna tetap enggan. Ratna mengaku trauma dan khawatir jika nantinya akan ada kejadian lain yang menimpanya. Ia juga menyatakan pesimis bahwa laporan atas apa yang dialaminya tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.⁷

⁶ Redaksi Mojok, *Kronologi Penganiayaan Ratna Sarumpaet Seperti Diturunkan Tim Prabowo*, (<https://mojok.co/red/rame/kilas/kronologi-penganiayaan-ratna-sarumpaet-seperti-diturunkan-tim-prabowo/>, diakses pada 4 Februari 2019).

⁷ Tim CNN Indonesia, *Ratna Sarumpaet Tak Lapor Polisi Karena Pesimis Diproses*, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181002200712-12-335148/ratna-sarumpaet-tak-lapor-polisi-karena-pesimis-diproses>, diakses pada 4 Februari 2019).

Keesokan harinya, yakni pada 3 Oktober dugaan penganiayaan semakin menampakkan titik terang. Kerja polisi membuahkan hasil. Beberapa media terus menyajikan berita mengenai fakta atas kejadian yang dialami Ratna Sarumpaet, yang bertentangan dari pengakuan Ratna sendiri. Akhirnya, pada sore harinya, dengan menggelar sebuah konferensi pers di kediamannya, di Jalan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Ratna mengakui bahwa penganiayaan yang dialaminya merupakan sebuah kebohongan yang dibuat. Faktanya, pada tanggal 21 hingga 24 September 2018 Ratna berada di Rumah Sakit Khusus Bina Estetika, Menteng, Jakarta untuk menjalani prosedur sedot lemak di pipi.

Berita bohong atau hoaks benar-benar menemukan momentum dan daya besar di era digital saat ini. Di mana arus informasi mengalir dengan deras, begitu banyak dan cepat. Kabar penganiayaan Ratna yang menguap ke permukaan publik begitu singkat namun memiliki dampak yang besar. Tidak heran jika kemudian kebohongan yang dibuat Ratna Sarumpaet yang terlanjur bergulir dan dianggap meresahkan masyarakat negeri ini dikenai sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jerat ini yang akhirnya membuat Ratna ditangkap tangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 4 Oktober 2018 saat hendak bertolak ke Cile.

Jika dulu penyebaran informasi hanya dari mulut ke mulut, kini penyebaran informasi juga terjadi dari jari ke jari. Peran teknologi kian mendukung kinerja media massa yang melakukan proses jurnalistik, memproses fakta untuk dijadikan sebuah informasi yang dikabarkan ke publik. Realitas informasi yang dibentuk media massa ini dibentuk, dibingkai, serta dipoles sedemikian rupa, dikonstruksi berdasarkan ideologi media massa tersebut.

BAB I: berjudul Pendahuluan, pada bab ini berisi enam hal pokok mengenai penelitian, yakni latar belakang masalah yang mengemukakan fenomena sosial yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah yang merupakan akar masalah yang jawabannya akan ditemukan setelah melakukan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dijabarkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Kepustakaan, pada bab ini berisi kajian teoritis substansial yang berkaitan dengan judul penelitian, kajian teori analisis tekstual yang digunakan, dan kajian penelitian yang relevan sebagai rujukan dan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan saat ini.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dengan uraian secara rinci dan memadai tentang jenis analisis teks yang digunakan tersebut, unit analisis yang menjelaskan wujud dan bentuk teks, serta limitasi penelitian. Pada bab ini juga membahas tahapan penelitian dari awal hingga akhir yang dilakukan peneliti, serta menguraikan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini akan berisi deskripsi objek penelitian yang memaparkan hal-hal terpenting tentang sumber teks yang dianalisis, yakni media daring Kompas dan Republika, dari mulai sejarah, rubrik yang dimiliki, hingga asal rubrik teks berita yang dianalisis. Subbab kedua pada bab ini adalah penyajian data utuh yang dikumpulkan sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan pada bab I. Selanjutnya adalah analisis data, yang berisi temuan makna teks dan tafsiran dari data yang telah dianalisis.

Penyebab turunnya ayat tersebut menurut A. Mudjab Mahali, berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada seorang sahabat bernama Al Harits. Rasulullah mengajak Al Harits yang telah berikrar bahwa dirinya telah menyatakan masuk Islam untuk mengeluarkan zakat. Al Harits pun menyanggupi kewajiban itu seraya berkata, “Ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Barang siapa yang mengikuti ajakanku, aku akan kumpulkan zakatnya. Apabila telah sampai waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat yang telah aku kumpulkan itu.”

Ketika Al Harits telah mengumpulkan zakat dan waktu yang ditetapkan telah tiba, ternyata tak ada seorang pun utusan yang datang kepadanya. Al Harits mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah marah padanya. Sedangkan di sisi lain, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Rasulullah telah mengutus Al Walid bin Uqbah untuk mengambil dan menerima zakat yang ada pada Al Harits.

Ternyata ketika Al Walid berangkat, di tengah perjalanannya, hatinya merasa gentar, sehingga dia pulang. Al Walid pulang dan melapor kepada Rasulullah bahwa Al Harits tidak mau menyerahkan zakatnya kepadanya, bahkan dikatakan Al Harits akan membunuhnya.

Kemudian Rasulullah mengirim utusan berikutnya kepada Al Harits. Mereka pun saling bertemu di perjalanan. Al Harits pun bertanya, “Kepada siapa engkau diutus?” Utusan itu menjawab, “Kami diutus kepadamu.” Al Harits kembali bertanya, “Mengapa?”. “Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Al Walid bin Uqbah. Dia mengatakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuhnya.” Al Harits pun menjawab, “Demi Allah yang telah

- 1) Informasi yang dapat meneguhkan hati penerima informasi, mengandung kebenaran, pengajaran, dan peringatan, serta menyadarkan orang lain dari kelalaian (Q.S.11:120).
 - 2) Informasi yang tidak menyembunyikan kebenaran yang perlu diketahui masyarakat dan mencampuradukkan berita benar dengan berita yang salah atau *batil* (Q.S.8:8), sekaligus informasi yang disampaikan tidak memihak salah satu pihak atau adil (Q.S.49:9).
 - 3) Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan atau pertentangan (Q.S.2:213), sekaligus dapat mendamaikan dari perselisihan (Q.S.49:9).
 - 4) Informasi yang dapat menghilangkan kemungkinan penerima informasi untuk mengemukakan praduga yang salah terhadap objek informasi (Q.S.3:154).
 - 5) Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif penyampai informasi yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi informasi yang dapat mendorong munculnya semangat berkompetisi dalam berbuat kebaikan (*sabiqun bil al khairaat*) serta dapat menyentuh rasa penerima informasi, sehingga mereka memiliki ketetapan hati tentang kebenaran yang diterimanya (Q.S.5:48 dan 83).
- b. *'Amr ma'ruf nahi munkar*, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Dalam hal ini, informasi diarahkan pada berkembangnya nilai-nilai kebaikan dan berkurangnya nilai-nilai keburukan pada kehidupan penerima informasi,

baik dalam kehidupan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat (Q.S.3:110).

- c. *Hikmah*, yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang *haq* dengan yang *batil*. Tetapi, cara penyampaiannya mengandung nilai bijaksana, mengandung sentuhan kelembutan rasa dan menyentuh kesadaran kognitif yang tinggi, sehingga mampu membangkitkan motivasi penerima informasi untuk mempertahankan sikap dan tingkah laku yang baik dan mampu menumbuhkan kesadaran utuh untuk mengubah sikap dan perilaku yang buruk (Q.S.16:125).
- d. *Tabayyun*, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi. Artinya, menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utama, bahkan beberapa sumber yang dianggap bisa memberikan kejelasan informasi (lihat QS. 49:6), sehingga informasi yang disampaikan dapat bersifat adil (tidak berpihak). Begitu pula, penerima informasi bisa menentukan sikap yang adil (lihat QS. 49:9).
- e. *Mauizhah hasanah*, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, baik melalui proses imitasi ataupun identifikasi (Q.S.16:125). Dalam hal ini, Alquran memberikan informasi yang mengandung contoh yang baik melalui gambaran tentang figur teladan bagi umat Islam, antara lain Luqman Al Hakim tatkala memberikan pengajaran terhadap anaknya, atau Ibrahim as. yang dinyatakan sebagai individu dengan Al Qalb Al Salim (Q.S.31:13-19 dan Q.S.26:78-89).

kesalahan orang lain dengan tujuan menjelek-jelekannya (*ghibah*) adalah fenomena jurnalistik yang dilarang dalam Islam (Q.S.49:11-12). Akibat dari hal ini adalah menimbulkan kejengkelan dan rasa sakit hati orang yang diejek, menyuburkan sikap saling curiga, hingga permusuhan. Meski begitu, jurnalistik dakwah memberikan dispensasi terhadap *ghibah* yang menjadi pintu masuk fungsi kontrol sosial dalam profesi jurnalistik. Seperti dalam mengungkap kejahatan pejabat publik karena melakukan penyalahgunaan jabatan atau laku buruk lain yang merugikan kepentingan umum. Melalui kontrol sosial ini, jurnalis mengimplementasi amanah agung risalah dakwah: '*amar ma'ruf nahi munkar*'. Fungsi ini memberi nilai lebih pers dan profesi jurnalistik dengan sebutan "pilar keempat" demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif, juga "angkatan keempat" pasukan perang setelah angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

4. Menggunakan kata yang bermakna, santun, lembut, argumentatif dalam berita. Prinsip ini disebut *bi al-hikmah* (Q.S.16:125). *Hikmah* adalah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang *haq* dan *bathil*, yang paling utama dari pengetahuan maupun perbuatan, sesuatu yang akan mendatangkan kemaslahatan dan menghalangi kemudharatan, himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara berimbang, serta kebenaran berdasarkan ilmu dan akal yang tidak diragukan kebenarannya dan tidak mengandung kelemahan dan keaburan. *Al-hikmah* dalam jurnalistik dakwah berarti informasi yang

1. *Unlimited Space*. Media daring memungkinkan halaman tak terbatas. Ruang bukan masalah. Artikel dan berita bisa ditulis panjang dan selengkap mungkin, tanpa batas.
2. *Audience Control*. Media daring memungkinkan pembaca lebih leluasa memilih berita/informasi.
3. *Non-lienarity*. Dalam media daring masing-masing berita berdiri sendiri, sehingga pembaca tidak harus membaca secara berurutan.
4. *Storage and Retrieval*. Media daring memungkinkan berita tersajikan dengan “abadi”, tersimpan, dan bisa diakses kembali dengan mudah, kapan dan di mana saja.
5. *Immediacy*. Media daring menjadikan informasi tersampaikan secara cepat dan langsung.
6. *Multimedia Capability*. Media daring memungkinkan sajian berita berupa teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya sekaligus.
7. *Interactivity*. Media daring memungkinkan interaksi langsung antara redaksi dengan pembaca, seperti melalui kolom komentar dan *social media sharing*.

E. Analisis Bingkai Model Robert N. Entman

Gagasan mengenai *framing* untuk melihat bagaimana media massa dan publik memandang realitas sosial pada dasarnya dipelopori oleh Batterson pada tahun 1995 yang memaknai *framing* sebagai struktur konseptual yang mengorganisasi pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974 yang mengandaikan bingkai sebagai kepingan-

paling utama (*master frame*). Pendefinisian masalah adalah penekanan tentang bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh wartawan. Setiap wartawan mempunyai perspektif yang berbeda dalam melihat suatu masalah, sehingga menyebabkan bentukan realitas yang berbeda. Artinya sebuah peristiwa dapat dipahami secara positif dan dapat dipahami juga secara negatif tergantung bagaimana peristiwa tersebut ditafsirkan.

Kedua, *diagnose causes* atau memperkirakan penyebab masalah. Elemen ini untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Pada elemen ini, penyebab masalah bisa dilihat dari dua sisi, yaitu apa (*what*) dan siapa (*who*) dari suatu peristiwa. Bagaimana suatu realitas dipahami dapat menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Oleh sebab itu, masalah yang dipahami secara berbeda, akan memberi pemahaman yang berbeda terhadap penyebab terjadinya masalah. Dengan kata lain, pendefinisian sumber masalah ini menyertakan secara lebih luas siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang dipandang sebagai korban.

Ketiga, *make moral judgement* atau membuat pilihan moral. Elemen ini digunakan untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah dari suatu peristiwa sudah didefinisikan dan penyebab masalah telah ditentukan, maka dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan suatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. Dalam tahap ini, wartawan hanya perlu memberikan penekanan untuk memperkuat argumentasi, disertai dengan bukti-bukti konkrit yang telah diperoleh wartawan.

penelitian. Selain itu, analisis teks penelitian ini adalah analisis wacana, bukan analisis bingkai seperti yang dilakukan peneliti.

2. Konstruksi Media cnnindonesia.com dan jawapos.com Tentang Larangan Bercadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Analisis Framing Model Zhondhang Pan dan Gerald M. Kosicki). Penelitian ini digunakan Arifah Syarofina, Sarjana Sosial Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019.

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengupas bagaimana media CNNIndonesia.com dan JawaPos.com mengonstruksi isu Larangan Bercadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ke dalam sebuah berita. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif tekstual dengan metode deskriptif-komparatif dengan analisis bingkai model Zhondhang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama menggunakan analisis bingkai. Namun penelitian ini menggunakan objek dari media daring yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu, objek teks berita yang diteliti serta model analisisnya pun berbeda.

3. Analisis Framing Pemberitaan (*Isu Penyerangan Ulama di Indonesia* dalam *Harian Kompas.com* dan *Republika.co.id* Periode Februari-April 2018) oleh Fairuz Ilham Magribi, Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019.

Penelitian ini ini dilakukan untuk mendeskripsikan pembingkai berita Isu Penyerangan Ulama di Indonesia dengan menggunakan paradigma

konstruktivisme, pendekatan kualitatif, serta metode analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembingkaihan berita oleh kompas.com dan republika.co.id tidak lepas dari ideologi masing-masing media dan memiliki kepentingan masing-masing dalam pemberitaannya. Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, karena menggunakan analisis framing model Robert N. Entman pada berita di media daring Kompas dan Republika. Namun, penelitian ini jelas berbeda karena menyoroti *Isu Penyerangan Ulama di Indonesia* pada periode Februari-April 2018. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada berita terkait kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet pada periode Oktober 2018.

4. Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Pemberitaan *Hoax* Ratna Sarumpaet di Detik.com Rentang Waktu 3-31 Oktober 2018 oleh Nurul Huda, Sarjana Ilmu Komunikasi dalam bidang Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pembingkaihan berita media daring Detik.com tentang pemberitaan hoaks Ratna Sarumpaet yang memberikan opini sehingga memperpanjang permasalahan yang dihadapi oleh Ratna Sarumpaet. Dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, peneliti menemukan bahwa pemberitaan Detik.com sangat menyudutkan pihak Ratna Sarumpaet. Detik.com dalam pemberitaannya mengaburkan fakta dengan menonjolkan opini dari wartawan, sehingga opini tersebut seakan-akan sesuai dengan fakta.

objek penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis bingkai untuk menemukan makna dari data yang dianalisis.⁵ Desain deskriptif adalah metode membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Melalui desain deskriptif ini, peneliti dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu.

Bingkai atau *framing* sebagai salah satu analisis kualitatif teks media dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media massa saat mengonstruksi, mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna atau menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif media.⁶ Selanjutnya, konsep bingkai yang digunakan peneliti adalah konsep milik Robert N. Entman. Menurut Entman, konsep bingkai digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media.⁷ Dengan melihat dua dimensi pada tiap teks berita serta empat perangkat analisis pbingkaian berita pada model analisis Entman, peneliti menampakkan realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok yang digunakan kedua media daring, baik Kompas, maupun Republika dalam mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas di balik pemberitaan hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akhirnya menjadi metode yang tepat karena uraian susunan data dari hasil analisis yang dilakukan mampu menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya

⁵ Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h.45-56.

⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* Cetakan VII, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2015), h.162.

⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* Cetakan VI, (Yogyakarta: LkiS, 2009), h.186.

multimedia story telling yang dikenal sebagai Visual Interaktif Kompas (VIK).

Sesuai fitrahnya, media *daring selalu* dituntut menyajikan berita secara cepat. Namun, bagi *Kompas.com* kecepatan bukan segalanya. Bagi *Kompas.com*, "*Get it first, but first get it right*" menjadi adagium jurnalistik lama media daring yang selalu dipegang teguh. Selain itu, dalam upayanya memberi jawaban (*voice*) atas kegaduhan-kegaduhan (*noise*), *Kompas.com* tidak hanya memiliki ratusan reporter di berbagai pelosok Indonesia yang siap membuat karya-karya jurnalistik berdasarkan informasi di lapangan, *Kompas.com* juga memiliki divisi media sosial yang selalu memonitor percakapan media sosial secara *real-time*. Hasil *social media listening* kemudian diberikan kepada tim redaksi untuk dipakai sebagai olahan di dapur *Newsroom*.

Redaksi *Kompas.com* juga terbiasa bekerja untuk memfilter informasi fakta ataupun hoaks, baik informasi di lapangan maupun informasi di media sosial. *Kompas.com* bisa menjadi referensi pembaca untuk memvalidasi apakah sebuah informasi itu hoaks atau bukan. Demi mendapatkan kebenaran jurnalistik itu, *Kompas.com* disiplin dalam melakukan verifikasi atas fakta dan data yang didapatkan di lapangan atau di media sosial. Kerja jurnalistik *Kompas.com* secara otomatis menempatkan diri sebagai *fact-checker* dari setiap simpang-siur berita yang ada.

Upaya *Kompas.com* sebagai *fact-checker* telah dilakukan sejak tahun 2016, dengan pembuatan Topik Pilihan "Hoaks atau Fakta?". Upaya ini

4) Teks IV

Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye Terkait Hoaks Ratna Sarumpaet

Kamis, 25 Oktober 2018 | 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan tidak ada pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait dengan penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa tindakan Ratna Sarumpaet menyebarkan hoaks bukan bagian dari kampanye hitam, sehingga tidak melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Itu bukan kampanye. Jadi memang sudah kami pelajari barang bukti yang disertakan kemudian mempelajari isi laporan dari pelapor dan juga mendengarkan keterangan dari KPU memang terbukti tidak ada pelanggaran pemilu. Jadi peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran pemilu," kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dikonfirmasi via telepon selularnya, Kamis (25/10/2018).

"Artinya peristiwa perbuatan Ratna Sarumpaet itu kemudian juga konpers yang dilakukan oleh tim kampanye 02 itu setelah kami pelajari juga mengaitkan dengan klarifikasi, itu tidak ada, tidak ditemukan pelanggaran pemilu," sambungnya.

Sebelum mengambil keputusan, Bawaslu memeriksa pihak pelapor, saksi, dan sejumlah bukti. Pemeriksaan juga dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu.

Ahli yang dimintai pendapat adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara bukti yang diperiksa, merupakan rekaman pernyataan tim kampanye Prabowo-Sandiaga dan Ratna Sarumpaet terkait penyebaran hoaks.

Meskipun tidak memeriksa pihak terlapor, Ratna Dewi mengatakan, pihaknya tetap dapat mengambil kesimpulan.

"Sebenarnya tanpa memeriksa terlapor, kami sebenarnya juga sudah bisa mengambil kesimpulan," ujar dia.

Dengan diambilnya keputusan ini, Bawaslu menyatakan menutup kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet sebagai dugaan dari pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye Prabowo-Sandiaga.

Sebelumnya, Bawaslu menerima sejumlah laporan dan aduan pasca-pengakuan Ratna yang berbohong soal penganiayaan terhadap dirinya.

Salah satu yang mengadukan adalah tim kampanye nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin melalui Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin mengadukan dugaan pelanggaran kesepakatan kampanye damai dan anti-hoaks.

Sebelum TKN, ada kelompok yang menamakan Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR).

GNR menyerahkan laporan soal dugaan kampanye hitam yang dilakukan Prabowo-Sandiaga melalui penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Tak hanya itu, relawan Jokowi Projo juga melaporkan tindakan Ratna ke Bawaslu dengan dugaan kampanye hitam.¹¹

¹¹ Fitria Chusna Farisa, *Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye Terkait Hoaks Ratna Sarumpaet*, (<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/25/17244761/bawaslu-tak-ada-pelanggaran-kampanye-terkait-hoaks-ratna-sarumpaet>, diakses pada 26 Januari 2019).

b. Berita pada Republika Online

1) Teks I

Ratna Sarumpaet Diduga Dianiaya, Prabowo akan Temui Kapolri

Selasa, 02 Okt 2018 | 21:33 WIB

Prabowo mengatakan, akan menemui kapolri untuk membicarakan kasus kekerasan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai kekerasan yang menimpa salah satu tim pemenangan nasionalnya, Ratna Sarumpaet. Prabowo mengatakan, akan menemui kapolri untuk membicarakan kasus kekerasan tersebut.

"Kami disini sangat prihatin dan saya bersama tokoh-tokoh dari badan pemenangan koalisi Indonesia adil makmur berencana dalam waktu dekat akan menghadap kapolri dan pejabat lain untuk membicarakan masalah ini," kata Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (2/10).

Prabowo menilai, tindakan yang dialami Ratna Sarumpaet merupakan tindakan represif yang terjadi diluar nilai kepatutan. Dia melanjutkan, tindak kekerasan itu juga merupakan sebuah pelanggaran HAM dan bahkan perbuatan pengecut mengingat dilakukan kepada wanita berusia 70 tahun.

Dugaan penganiayaan Ratna pertama kali di media sosial. Bahkan, foto wajah Ratna Sarumpaet membengkak dan memar akibat penganiayaan tersebut beredar di media sosial. Peristiwa tersebut menimpa Ratna di Cimahi, Bandung pada Jumat (21/9) lalu.

Prabowo mengaku baru mengetahui kondisi salah satu tim pemenangannya itu pada Senin (1/10) malam. Dia mengaku kaget setelah melihat kondisi Ratna Sarumpaet yang babak belur melalui kiriman beberapa foto. Keesokan harinya dia baru menemui Ratna bersama dengan Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

"Dia sangat ketakutan, trauma saya liat sendiri. Ini menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan ini sangat ironi," katanya.

Prabowo mengatakan, tindak kekerasan yang disertai ancaman itu membuat Ratna enggan melaporkan dugaan pemukulan kepadanya ke pihak berwajib bahkan meski sudah masuk rumah sakit. Dia melanjutkan, wanita yang sempat diduga terlibat gerakan makar ini akhirnya pasrah untuk mempolisikan kasusnya setelah diketahui publik luas.¹²

¹² Rizkian Adiyudha, *Ratna Sarumpaet Diduga Dianiaya, Prabowo akan Temui Kapolri*, (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/02/pfz748354-ratna-sarumpaet-diduga-dianiaya-prabowo-akan-temui-kapolri>, diakses pada 26 Januari 2019).

2) Teks II

Wasekjen PAN: Amien Rais Insya Allah Penuhi Panggilan Polisi

Senin, 08 Okt 2018 | 15:27 WIB

Polisi menjadwalkan pemanggilan ulang Amien pada pekan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini memastikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais akan memenuhi pemanggilan ulang Polda Metro Jaya atas kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet. Dia juga mengatakan, mantan ketua MPR itu bakal menaati proses hukum.

"Rabu (pekan ini) setahu saya dipanggil (polisi terkait kasus Ratna). Datang Insya Allah. Kan Pak Amien taat hukum," kata dia saat dihubungi *Republika.co.id*, Senin (8/10).

Faldo menambahkan, PAN percaya polisi menangani kasus hoaks Ratna dengan profesional. Ia tak khawatir jika pengusutan kasus oleh kepolisian ini kemudian akan berdampak negatif pada PAN.

"Kami percaya sama polisi, kita percaya sama hukum, Kami percaya sama penegakan hikum," ujarnya.

Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Amien sebagai saksi dalam kasus hoaks Ratna pada Jumat (5/10) lalu. Namun, Amien dipastikan mangkir lantaran tidak memberikan alasan ketidakhadiran.

Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Kombes Pol Jerry R Siagian mengungkapkan, penyidik menjadwalkan pemanggilan ulang Amien pada pekan ini. Namun, polisi tak menjelaskan materi yang akan digali dari mantan ketua umum PAN itu.

"Rencananya pekan depan untuk (pemanggilan ulang) Amien Rais," ungkap Jerry Ahad kemarin.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, Polda tentu berharap Amien memenuhi panggilan sebagai saksi. Sebab penyidik butuh keterangan Amien dalam kasus hoaks Ratna. "Mudah-mudahan Insya Allah hadir," katanya.

Argo melanjutkan, penyidik Polda melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Amien sebagai saksi yang mengetahui, melihat, dan mendengar pengakuan Ratna saat mengaku menjadi korban pengeroyokan. Penyidik saat ini belum akan mengarah pada politisi Partai Gerindra Fadli Zon untuk dimintai keterangan sebagai saksi.¹³

¹³ Umar Mukhtar, *Wasekjen PAN: Amien Rais Insya Allah Penuhi Panggilan Polisi*, (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/08/pg9u5y428-wasekjen-pan-amien-rais-insya-allah-penuhi-panggilan-polisi>, diakses pada 26 Januari 2019).

3) Teks III

Kasus Hoaks Ratna, Polisi Telah Periksa Plt Kadisparbud DKI

Kamis, 11 Okt 2018 | 18:38 WIB

Kepolisian memeriksa Asiantoro berbarengan dengan pemeriksaan Amien Rais.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, telah memeriksa Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Asiantoro, pada Rabu (10/10) lalu terkait kasus *hoaks* Ratna Sarumpaet. Kepolisian memeriksa Asiantoro berbarengan dengan pemeriksaan politikus senior PAN, Amien Rais.

“Kemarin juga hari Rabu kita sudah lakukan pemeriksaan saksi dari Plt Kepala Dinas Pariwisata DKI. Kita lakukan pemeriksaan,” jelas Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/10).

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap Asiantoro dilakukan lantaran melakukan sponsor untuk kepergian Ratna ke Cile, tapi untuk pengembalian dana sponsor tersebut masih akan dikordinasikan dengan Kadisparbud. Selain itu, belum ada rencana pemanggilan saksi lagi untuk kasus penyebaran berita bohong atau *hoaks* yang dilakukan Ratna.

“Intinya bahwa berkaitan dengan sponsor untuk tersangka RS ke Cile, bagaimana kronologinya kemudian saksi ditanya mengetahuinya dari mana. Untuk sementara belum ada (pemanggilan saksi lagi). Kita melihat kalau memang sudah cukup, ya. Kita masih belum memastikan karena masih dievaluasi,” papar Argo.

Sebelumnya, sepanjang Selasa (2/10), publik dihebohkan oleh kabar dugaan penganiayaan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet. Kabar beredar viral di media sosial (medsos), termasuk foto wajah Ratna yang terlihat lebam di bagian mata kanan dan kirinya, yang ternyata adalah berita bohong atau *hoaks*.

Sempat diduga akan kabur ke Cili, Ratna ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (4/10). Belakangan diketahui, keberangkatan Ratna ke Cili rupanya untuk menghadiri acara The 11th Women Playrights International Conference 2018.¹⁴

4) Teks IV

Setop Kasus Ratna, Bawaslu: Prabowo tak Lakukan Pelanggaran

Kamis, 25 Okt 2018 | 16:05 WIB

Bawaslu sebelumnya menerima laporan pelanggaran pemilu terkait kasus Ratna Sarumpaet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan menghentikan penanganan kasus *hoaks* Ratna Sarumpaet. Dengan demikian, kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait penyebaran informasi *hoaks* ini tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan di kepolisian.

¹⁴ Rahma Sulistya, *Kasus Hoaks Ratna, Polisi Telah Periksa Plt Kadisparbud DKI*, (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/11/pgfn01409-kasus-hoaks-ratna-polisi-telah-periksa-plt-kadisparbud-dki>, diakses pada 26 Januari 2019).

Selain itu, tindakan dugaan penganiayaan dan aksi kekerasan pada Ratna Sarumpaet yang menyebabkan dirinya enggan melapor juga disebut sebagai perbuatan yang di luar batas dengan dikaitkan dengan diri Ratna yang merupakan “ibu-ibu berusia 70 tahun”. Pada kutipan berita disebutkan:

““Kalau terjadi suatu fitnah ada prosesnya, bisa diadakan ke pengadilan. Tapi melakukan tindakan seperti ini terhadap seorang ibu-ibu berusia 70 tahun saya kira ini sebagai suatu tindakan yang di luar batas,” ujar Prabowo.”

Kompas.com dalam beritanya juga menngambarkan dua kasus lain serupa dengan mengutip pernyataan Prabowo selain pengeroyokan Ratna Sarumpaet yang disebut sebagai tindakan persekusi, yakni yang menimpa Neno Warisman dan Novel Baswedan. Dalam berita disebutkan:

“Menurut Prabowo, kasus kekerasan yang dialami oleh Ratna bukan yang pertama kali.

Ia menyebutkan kasus persekusi yang dialami oleh Wakil Ketua (BPN) sekaligus aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman.

Kemudian, ia juga menyinggung kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.”

Treatment Recommendation. Pernyataan Prabowo yang disebutkan pada berita yakni dari sebuah agenda “*keterangan pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018) malam,*” yang menyebut akan menemui Kapolri terkait kasus dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet, *Kompas.com* merekomendasikan agar kasus ini dibawa ke pengadilan. Seluruh upaya pertautan data dan fakta yang meski sarat pula akan nilai politik, memberikan penyelesaian kasus melalui jalur hukum menjadi konsekuensi logis. Hal tersebut juga sejalan

Akan Temui Kapolri,” dibingkai dengan aspek hukum. Hal ini dapat dilihat dari judul dan *lead* yang menyebut rencana Prabowo yang akan menemui Kapolri, selaku kepala institusi penegak hukum.

“Prabowo mengatakan, akan menemui kapolri untuk membicarakan kasus kekerasan tersebut.”

Meski menyinggung mengenai politik seperti menyebut atribusi Ratna sebagai tim kemenangan nasional Prabowo-Sandi, dan menyertakan kutipan langsung mengenai pernyataan Prabowo yang menyinggung mengenai adanya ancaman demokrasi atas dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet ini, Republika tetap membawa berita ini konsisten pada masalah hukum.

Kejadian yang menimpa Ratna Sarumpaet ini, disebutkan pula oleh Republika dalam teks berita sebagai kasus kekerasan, tindakan represif, pelanggaran HAM, dan juga dipandang ironi. Dalam kutipan berita disebutkan:

“Calon presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai kekerasan yang menimpa salah satu tim kemenangan nasionalnya, Ratna Sarumpaet. Prabowo mengatakan, akan menemui kapolri untuk membicarakan kasus kekerasan tersebut.

"Kami disini sangat prihatin dan saya bersama tokoh-tokoh dari badan kemenangan koalisi Indonesia adil makmur berencana dalam waktu dekat akan menghadap kapolri dan pejabat lain untuk membicarakan masalah ini," kata Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (2/10).

Prabowo menilai, tindakan yang dialami Ratna Sarumpaet merupakan tindakan represif yang terjadi diluar nilai kepatutan.”

Pada paragraf keempat teks berita disebutkan mengenai kejadian sebelum Prabowo akhirnya menjenguk Ratna untuk melihat kedaannya secara langsung. Kronologi yang menampakkan runtutan ini juga menekankan bahwa fokus berita ini dibawa redaksi Republika kepada fokus hukum. Hal

Republika. Atribusi “mantan ketua MPR” pada Amien Rais oleh Republika juga secara tersirat mendukung pernyataan Faldo. Karena sebagai mantan ketua lembaga tinggi negara, Amien memang sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum.

Selain pada sikap Amien Rais, Republika juga menyebutkan nilai Islam pada pernyataan langsung narasumber yang turut dicatutkan, yakni “*Insyah Allah.*” Hal ini menampakkan sikap agamis narasumber yang meyakini bahwa Amien Rais benar-benar akan menepati janji untuk memenuhi pemanggilan polisi. Hal ini disebutkan Faldo untuk memastikan kehadiran Amien dan juga gambaran optisme polisi yang berharap pada kehadiran Amien Rais. Kutipan berita tersebut:

“Rabu (pekan ini) setahu saya dipanggil (polisi terkait kasus Ratna). Datang *Insyah Allah.* Kan Pak Amien taat hukum,” kata dia saat dihubungi **Republika.co.id**, Senin (8/10).”

“Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, Polda tentu berharap Amien memenuhi panggilan sebagai saksi. Sebab penyidik butuh keterangan Amien dalam kasus hoaks Ratna. “Mudah-mudahan *Insyah Allah* hadir,” katanya.”

Selain itu, Republika juga membingkai pemberitaan ini dengan tidak melupakan salah satu tokoh lain yang juga mestinya perlu untuk diundang polisi dengan pemanggilan sebagai saksi, yakni Fadli Zon. Rekomendasi ini juga disinggung untuk dilakukan pada Fadli Zon yang turut menemui Ratna Sarumpaet bersama Amien Rais dan Prabowo saat spekulasi hoaks penganiayaan Ratna masih berkembang dan belum adanya pengakuan kebohongan. Kalimat tersebut disebutkan pada kalimat akhir sebagai penutup berita:

pemberitaannya sebagai masalah hukum dengan mengambil judul “*Kasus Hoaks Ratna, Polisi Telah Periksa Plt Kadisparbud DKI.*” Hal tersebut tercermin pada sumber informasi yang menunjuk Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono sebagai pemegang jabatan institusi penegak hukum.

Melalui narasumber tersebut, Republika menyajikan informasi mengenai alasan pemanggilan Plt Kadisparbud tersebut, mulai kronologi hingga pengembalian dana sponsor yang harus dilakukan oleh Ratna. Selain itu, masalah juga difokuskan Republika pada keberlanjutan proses hukum atas pengusutan kasus penyebaran hoaks oleh Ratna dengan mempertanyakan saksi lain yang kemungkinan akan dipanggil dalam kasus ini.

Causal Interpretation. Penyebab pemanggilan Plt Kadisparbud ini disebutkan oleh Republika disebabkan atas penggunaan dana sponsor Ratna Sarumpaet untuk pergi ke Cile yang menggunakan dana Pemprov DKI Jakarta melalui proposal yang diajukan melalui Disparbud. Dalam berita disebutkan:

“Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap Asiantoro dilakukan lantaran melakukan sponsor untuk kepergian Ratna ke Cile, tapi untuk pengembalian dana sponsor tersebut masih akan dikoordinasikan dengan Kadisparbud. Selain itu, belum ada rencana pemanggilan saksi lagi untuk kasus penyebaran berita bohong atau *hoaks* yang dilakukan Ratna.”

Moral Evaluation. Pemeriksaan terhadap Asiantoro, Plt Kadisparbud ini dihubungkan Republika dengan tambahan informasi bahwa pemanggilannya ini berbarengan dengan pemanggilan saksi lain yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan polisi, yakni Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat

Nasional (PAN), Amien Rais. Dengan menghadirkan satu-satunya sumber informasi dari pihak kepolisian, yakni Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono proses pemeriksaan dinampakkan dengan pemberian materi pertanyaan terkait kronologi dan pengembalian dana sponsor oleh Ratna Sarumpaet. Selain itu, Republika menggali informasi mengenai saksi lainnya yang mungkin perlu dimunculkan sebagai wujud konsistensi sajian pemberitaan yang berfokus pada masalah hukum dan pengusutan kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet. Dalam kutipan berita disebutkan:

“Intinya bahwa berkaitan dengan sponsor untuk tersangka RS ke Cile, bagaimana kronologinya kemudian saksi ditanya mengetahuinya dari mana. Untuk sementara belum ada (pemanggilan saksi lagi). Kita melihat kalau memang sudah cukup, ya. Kita masih belum memastikan karena masih dievaluasi,” papar Argo.”

Treatment Recommendation. Pada teks berita III, Republika memberikan pandangan penyelesaian masalah bahwa proses hukum serta pengusutan kasus Ratna Sarumpaet masih terus perlu berlanjut. Dengan turut menyeret pernyataan mengenai saksi lain yang perlu diperiksa lagi dalam kasus penyebaran hoaks dalam berita yang menyatakan rampungnya pemeriksaan terhadap Plt Kadisparbud, berarti polisi harus segera melanjutkan proses hukum dengan memberikan jeratan pasal tambahan pada Ratna ataukah mulai mencari saksi lain yang dibutuhkan.

“Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian, maka pada Kamis (25/10) Bawaslu menetapkan untuk menghentikan kasus dengan nomor laporan 03/LP/PP/RI/0/0.00/X/2018 itu. Adapun dasar penghentian kasus ini, yakni terlapor Prabowo Subianto, Fadli Zon, Dahnil Simanjuntak, Hanum Rais, dan Rachel Maryam terbukti tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu 7 Tahun 2017.

Ketika dikonfirmasi, anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, membenarkan adanya keputusan penghentian kasus ini. Menurut dia, keputusan ini adalah rekomendasi Bawaslu secara resmi.”

Moral Evaluation. Laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada kasus hoaks Ratna Sarumpaet ini ditampilkan Republika dengan “memutuskan menghentikan penanganan kasus hoaks Ratna Sarumpaet” sehingga “tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan di kepolisian.” Namun, keputusan ini ditunjukkan hanya dengan laporan nomor 03/LP/PP/RI/0/0.00/X/2018 yang dilayangkan Silas Dutu pada Bawaslu dengan fokus laporan pada tokoh BPN yang disebutkan secara spesifik, bukan kasus hoaks itu sendiri.

Selain itu, disebutkan bahwa keputusan ini diambil melalui pleno pada 25 Oktober 2018 malam tanpa adanya kesaksian Ratna Sarumpaet dengan alasan waktu masa penanganan pidana dan penyanggapan permintaan klarifikasi oleh Ratna Sarumpaet berbarengan, yakni pada Jumat 26 Oktober 2018.

“Sebelumnya, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya tidak akan kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Ratna Sarumpaet. Sebab, Ratna yang juga berstatus sebagai terlapor baru menyanggapi permintaan klarifikasi pada Jumat (26/10).

"Jadi waktunya tidak cocok, sementara kami harus mengambil sebuah keputusan tanpa adanya kesaksian dari Ibu Ratna Sarumpaet. Karena, Bawaslu bekerja dengan waktu yang kami miliki dan besok

elementer, seperti nilai berita, layak berita, dan bias berita.¹⁶ Menurut Abrar, pada umumnya terdapat empat teknik pembingkai berita yang biasa dilakukan wartawan, yakni ketidaksesuaian sikap dan perilaku (*cognitive dissonance*), membentuk pribadi khayal (empati), daya tarik yang melahirkan ketidakberdayaan (*packing*), dan menggabungkan kondisi, kebijakan, dan objek yang sedang aktual dengan fokus berita (asosiasi) yang diterapkan pada tiga bagian berita yang menjadi objek pembingkai. Bagian berita yang dimaksud yakni judul berita, fokus berita, dan penutup berita.

Pada pemberitaan kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet, peneliti menemukan bahwa kedua media daring, baik Kompas maupun Republika banyak membingkai judul pemberitaannya dengan teknik *packing* karena teks judul yang dipilih membawa pada kebenaran yang dikonstruksi media, sehingga pembaca tidak berdaya untuk menolak. Ini nampak dari keseluruhan judul kedua media daring, kecuali berita teks keempat pada Republika Online, yang menggunakan teknik asosiasi karena pembacanya diarahkan untuk memperoleh sebuah kesadaran bahwa “Prabowo Tak Lakukan Pelanggaran.”

Sementara itu, pada fokus berita, media daring Kompas lebih menekankan pada teknik *packing* dan asosiasi pada pembingkai beritanya. Teknik *packing* ini terlihat dari banyaknya informasi dari narasumber yang disertakan dalam berita sehingga secara tidak langsung akan melahirkan daya tarik pada pembaca yang tak berdaya menolak pembingkai yang dilakukan Kompas, seperti banyaknya kutipan yang ditonjolkan pada pernyataan Prabowo saat menyatakan akan menemui Kapolri atas dugaan penganiayaan yang menimpa

¹⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* Cetakan VII, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2015), h.173.

Berbeda dari Kompas, Republika pada fokus beritanya menggunakan teknik empati serta *packing*. Teknik empati yang dilakukan Republika digunakan pada bingkai pemberitaan mengenai dugaan adanya pengeroyokan yang dialami Ratna dengan narasi yang mampu membawa pembaca seolah bisa merasakan kepedihan yang dialami Ratna Sarumpaet. Hal ini terlihat pada teks berita pertama, dengan narasi-narasi seperti “mengingat dilakukan kepada wanita berusia 70 tahun,” “Bahkan, foto wajah Ratna Sarumpaet membengkak dan memar akibat penganiayaan tersebut beredar,” “melihat kondisi Ratna Sarumpaet yang babak belur melalui kiriman beberapa foto,” dan “Dia sangat ketakutan, trauma saya liat sendiri.”

Setelah Ratna mengakui kebohongannya, barulah pemberitaan Republika yang berfokus pada pemberitaan mengenai kasus ini menggunakan teknik *packing* dan asosiasi. Teknik *packing* ini dilihat dari banyaknya informasi yang disebutkan dalam fokus berita, sehingga informasi-informasi tersebut menjadi hasil konstruksi kebenaran yang tak dapat ditolak pembaca karena begitu mendominasi isi berita. Teknik *packing* ini dilakukan pada teks kedua. Kutipan berita yang nampak, yakni:

“Rabu (pekan ini) setahu saya dipanggil (polisi terkait kasus Ratna). Datang Insya Allah. Kan Pak Amien taat hukum,” kata dia saat dihubungi *Republika.co.id*, Senin (8/10).

Faldo menambahkan, PAN percaya polisi menangani kasus hoaks Ratna dengan profesional. Ia tak khawatir jika pengusutan kasus oleh kepolisian ini kemudian akan berdampak negatif pada PAN.

“Kami percaya sama polisi, kita percaya sama hukum, Kami percaya sama penegakan hikum,” ujarnya.

Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Amien sebagai saksi dalam kasus hoaks Ratna pada Jumat (5/10) lalu. Namun, Amien dipastikan mangkir lantaran tidak memberikan alasan ketidakhadiran.”

ini terdapat pada teks berita kedua dan ketiga media daring Kompas, serta teks berita ketiga dan keempat Republika. Salah satu narasi bagian penutup yang menyangkut kronologi pada teks berita ketiga Republika:

“Sebelumnya, sepanjang Selasa (2/10), publik dihebohkan oleh kabar dugaan penganiayaan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet. Kabar beredar viral di media sosial (medsos), termasuk foto wajah Ratna yang terlihat lebam di bagian mata kanan dan kirinya, yang ternyata adalah berita bohong atau hoaks.

Sempat diduga akan kabur ke Cili, Ratna ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (4/10). Belakangan diketahui, keberangkatan Ratna ke Cile rupanya untuk menghadiri acara The 11th Women Playrights International Conference 2018.”

Sementara keterangan data tambahan dalam bagian penutup nampak pada teks berita pertama dan keempat media daring Kompas, juga teks pertama dan kedua Republika. Salah satu narasi bagian penutup yang menyangkut kronologi pada teks berita ketiga Kompas:

“Sebelumnya, Bawaslu menerima sejumlah laporan dan aduan pasca-pengakuan Ratna yang berbohong soal penganiayaan terhadap dirinya.

Salah satu yang mengadukan adalah tim kampanye nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin melalui Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin mengadukan dugaan pelanggaran kesepakatan kampanye damai dan anti-hoaks.

Sebelum TKN, ada kelompok yang menamakan Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR).

GNR menyerahkan laporan soal dugaan kampanye hitam yang dilakukan Prabowo-Sandiaga melalui penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Tak hanya itu, relawan Jokowi Projo juga melaporkan tindakan Ratna ke Bawaslu dengan dugaan kampanye hitam.”

Pemberitaan ini tentunya dilakukan pula oleh media daring Kompas dan Republika dengan pembingkai tersendiri. Terutama hal yang mendasari hal ini ialah latar belakang ideologi media. Pada teks berita pertama dari kedua media daring mengenai rencana Prabowo yang akan menemui Kapolri misalnya. Kedua media memberikan judul yang dapat dikatakan hampir mirip dan dengan sumber informasi yang sama, yakni Prabowo sebagai satu-satunya narasumber. Namun, isinya tentu saja berbeda.

Kompas melihat membingkai teks berita pertama dari segi hukum dan politik, mengaitkan pada kasus persekusi lain yang pernah terjadi dan secara tidak langsung menunjuk lawan politik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebagai penyebab permasalahan. Berbeda dengan Republika yang memandang hanya dari segi hukum. Sehingga meski pada realitanya narasumber benar-benar mengungkapkan pernyataan yang menunjuk seseorang/sekelompok orang sebagai penyebab masalah, Republika membingkai beritanya dengan narasi yang sebisa mungkin tidak ikut menuduh dengan menambahkan atribusi lain yang menggiring persepsi pada masyarakat bahwa penyebab masalah adalah lawan politik BPN seperti yang dilakukan Kompas. Begitu pula pada penyelesaian masalah, kedua media sama-sama memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan pada jalur hukum, namun dengan alasan berbeda. Kompas melihatnya karena Ratna Sarumpaet tidak berani melapor, maka Prabowo yang melapor. Sedangkan Republika mengatakan Ratna Sarumpaet akhirnya ‘mempolisikan kasus’ karena kejadian yang dialaminya telah diketahui oleh publik secara luas.

“saat dihubungi *Republika.co.id*, Senin (8/10).” Maka nampak bahwa Kompas.com di sini lebih memiliki narasumber dengan otoritas yang lebih baik dari Republika, dan lebih akurat karena sumber data didapatkan secara langsung dengan menemui sumber informasi secara langsung.

Selain itu, dari penggunaan judul, setidaknya juga dapat terlihat ideologi kedua media. Kompas lebih cenderung menggunakan kata “kepastian,” sedangkan Republika menggunakan “*Insyah Allah*,” yang memang diambil dari pernyataan Wakil Sekjen PAN sendiri saat menjawab terkait kepastian Amien Rais memenuhi pemanggilan polisi sebagai saksi. Hal ini pula yang selain menampakkan bahwa Amien Rais digambarkan sebagai tokoh yang agamis, ideologi Republika sebagai media yang memang bermuatan nilai Islam, religius nasionalis di sini menjadi nampak.

Selain narasumber Wasekjen PAN, Republika juga memilih dua narasumber dari institusi penegak hukum, menjadikan pemberitaan Republika mengenai hal ini berfokus pada aspek hukum. Selain itu, pemberitaan Republika menjadi jauh lebih berimbang karena sumber informasi yang dipilih adalah dari pihak Amien Rais dan di sisi lain adalah pihak kepolisian. Sementara Kompas isi beritanya condong pada sikap Amien Rais yang hanya memberikan informasi kepastian pemenuhan panggilan dari sumber informasi politikus PAN. Hal ini menunjukkan bahwa media juga menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor lain.

Kedua berita sama-sama tidak membahas alasan ketidakhadiran Amien Rais pada pemanggilan sebelumnya, namun Kompas pada berita sebelumnya menyuguhkan informasi alasan ketidakhadiran Amien Rais dari sisi pihak Amien Rais dengan judul berita “*Tim Prabowo-Sandiaga Kumpul Bahas Pendampingan*

Pada teks keempat, mengenai keputusan Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye, kedua media sama-sama memberikan informasi yang sama, yakni tidak adanya pelanggaran. Namun, laporan yang dilayangkan pada Bawaslu yang disebutkan kedua media berbeda. Sumber informasi yang dipilih kedua media pun juga berbeda, meski sama-sama dari Bawaslu.

Sumber informasi Kompas adalah Ratna Dewi Pettalolo selaku Komisioner Bawaslu. Pemberitaan berfokus pada aspek hukum pengusutan kasus hoaks Ratna Sarumpaet yang diduga melanggar kesepakatan kampanye damai dan anti-hoaks serta dianggap sebagai kampanye hitam. Berita Kompas membawa pada rekomendasi menutup kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet sebagai dugaan dari pelanggaran kampanye. Sedangkan Republika yang memilih narasumber dua anggota Bawaslu, yakni Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar—melihat keputusan Bawaslu ini sebagai aspek politik. Meski juga menyebutkan aspek hukum karena berhubungan dengan proses putusan, namun pemberitaannya lebih pada aspek politik. Keputusan bawaslu hanya didasarkan dari satu laporan yang dibuat Silas Dutu dari relawan pendukung Jokowi Projo yang tentu saja menjadi lawan politik BPN. Laporan tersebut menunjuk langsung capres Prabowo dan tim BPN Prabowo-Sandi, antara lain Fadli Zon, Dahnil Simanjuntak, Hanum Rais, dan Rachel Maryam yang terlibat pelanggaran kampanye dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Sehingga penyelesaian masalah yang disajikan pun adalah bahwa Prabowo dan tim BPN yang disebutkan tidak melakukan pelanggaran kampanye dalam kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Selanjutnya, pemberitaan kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet kaitannya dengan jurnalistik dakwah, pada media daring Republika, yang sudah dikenal sebagai media berbasis religius nasionalis sejak awal berdirinya, pemberitaan dengan mengangkat sisi religius dari tiap peristiwa/informasi benar dilakukan dan ditonjolkan. Sementara Kompas bersikap netral karena hal ini sesuai dengan nilai medianya yang bersifat lebih ideal bagi setiap kalangan.

Sementara itu, ditinjau dari jurnalistik Islami yang diwarisi dari sifat-sifat kenabian seperti *Shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathonah*, tidak kalah dari Republika, Kompas pun turut menjalankan nilai-nilai tersebut. Dalam memberitakan terkait kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet, media daring Kompas dan Republika sama-sama menjalankan sifat *shiddiq*, yakni menginformasikan informasi yang benar. Setiap pemberitaannya tidak ada yang menyesatkan dan judul berita dengan isi pemberitaannya sesuai. Dari penyebutan atribusi pada narasumber dalam berita pun, kedua media daring menyebutkan atribusi dengan benar dan penempatan atribusi tersebut dapat dikatakan tepat karena memang dapat membantu mencerminkan atas fokus pembahasan pemberitaan.

Pada sifat *amanah* yang berarti terpercaya, pemberitaan kedua media daring dapat dinilai masih kurang *amanah*. Dikatakan kurang karena meski Republika sangat amanah saat memberitakan kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet dari sisi hukum karena selalu menampakkan ketegasan pada proses pengusutan yang dilakukan, namun peneliti menemukan Republika kurang *amanah* saat fokus pemberitaannya adalah mengenai politik. Saat menilai putusan Bawaslu yang semestinya disajikan dengan nilai hukum, Republika menampakkannya dengan

nilai politik, Republika nampak menggunakan berita tersebut untuk membela pihak politik tertentu. Sementara pada pemberitaan Kompas, dalam pemberitaan dikatakan kurang *amanah* karena peneliti menemukan satu berita yang ditulis dengan sangat berapi-api dan sarat akan nilai politik yang seolah menuding pihak lain sehingga dapat mempengaruhi psikologis pembacanya. Atas hal yang disebut itu, kedua media daring menjadi kurang dapat dipercaya karena setidaknya masih dapat menyelipkan nilai tertentu lain yang tidak diinginkan oleh pembaca.

Pada sifat *tabligh* yang berarti menginformasikan kebenaran dan tidak menyembunyikannya, kedua media daring ditemukan cukup *tabligh* dalam pemberitaannya. Peneliti menemukan kedua media masih memiliki kecenderungan menyembunyikan informasi, bahkan informasi yang sepele, tapi setidaknya hal tersebut kiranya perlu dinampakkan karena pembaca berhak mendapatkan informasi yang utuh. Kompas nampak selalu memberikan informasi latar di mana sumber berita/narasumber ditemui, namun Republika tidak. Seperti pada pemberitaan politik yang disebut pada pembahasan sifat *amanah*, Republika dalam hal ini juga hanya menampakkan satu laporan yang dilayangkan pada Bawaslu, sementara Kompas memberikan informasi atas tiga laporan. Sementara itu, Kompas juga menyembunyikan keterangan mengenai suatu fakta, yakni saat pemanggilan Plt Kadisparbud, yang ternyata berbarengan dengan jadwal pemanggilan ulang Amien Rais. Padahal Republika menyertakan informasi ini.

Sifat yang terakhir yakni *fathonah*. Peneliti menemukan kedua daring bersifat *fathonah* yang artinya kedua media cerdas dan berwawasan luas. Analisis dan membaca situasi yang dilakukan kedua media ini banyak nampak pada *Moral Evaluation* dari perangkat analisis Entman. Seperti pemberian atribusi “Mantan

media *mainstream* di Indonesia, agar senantiasa tetap memberikan sajian yang berimbang dan memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia dan khususnya untuk Umat Islam.

4. Masyarakat umum diharapkan agar lebih bijaksana dan berpikir kritis terhadap setiap pemberitaan yang dilakukan berbagai media massa. Jangan mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang dikeluarkan oleh media dengan kepentingan tertentu. Sebaiknya jika membaca berita atau ingin mengetahui informasi tertentu atas suatu peristiwa tidak hanya membaca atau melihat informasi dari satu media saja tapi juga melihat pada media lainnya.

Sementara dengan adanya kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet, masyarakat, dan umat Islam khususnya dalam mencerna suatu informasi baiknya melakukan *tabayyun* (mencari kejelasan yang sebenarnya terlebih dahulu) untuk melihat kebenaran yang ada.

